



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN  
KOTA BLITAR



 (0342) 802162

 [dinkes@blitarkota.go.id](mailto:dinkes@blitarkota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 dapat disusun. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar selama Tahun 2023 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kota Blitar, yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, dan mendukung Visi Pemerintah Kota Blitar, yaitu **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dengan berupaya mewujudkan Misi ke-2 Pembangunan Kota Blitar yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang.

Blitar, Februari 2024

  
DINAS KESEHATAN  
KOTA BLITAR  
**Dr. DHARMA SETIawan, M.MKes.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680305 200112 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 adalah **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar menetapkan sasaran dalam Renstra tahun 2021-2026, **“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”** dan **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”**.

Perumusan keberhasilan pencapaian kinerja jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menetapkan 6 (lima) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Indikator Sasaran dan 1 (satu) indikator Sasaran lainnya, untuk menjadi tanggung jawab organisasi dan harus dicapai setiap tahunnya selama periode Renstra.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 adalah:

1. Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Prevalensi Balita Stunting;
4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi;
6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar; dan
7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar;

Dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 ditetapkan 4 (empat) program upaya strategis dan 1 (satu) program pendukung/Administrasi Umum, meliputi:

Program Upaya Strategis:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program Pendukung (Administrasi Umum):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing bidang, sekretariat dan sub bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam perumusan kebijakan Walikota demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar, sehingga ke depan akan terwujud peningkatan derajat masyarakat Kota Blitar yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2023 oleh masing-masing bidang, sekretariat dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran adalah sebagai berikut:

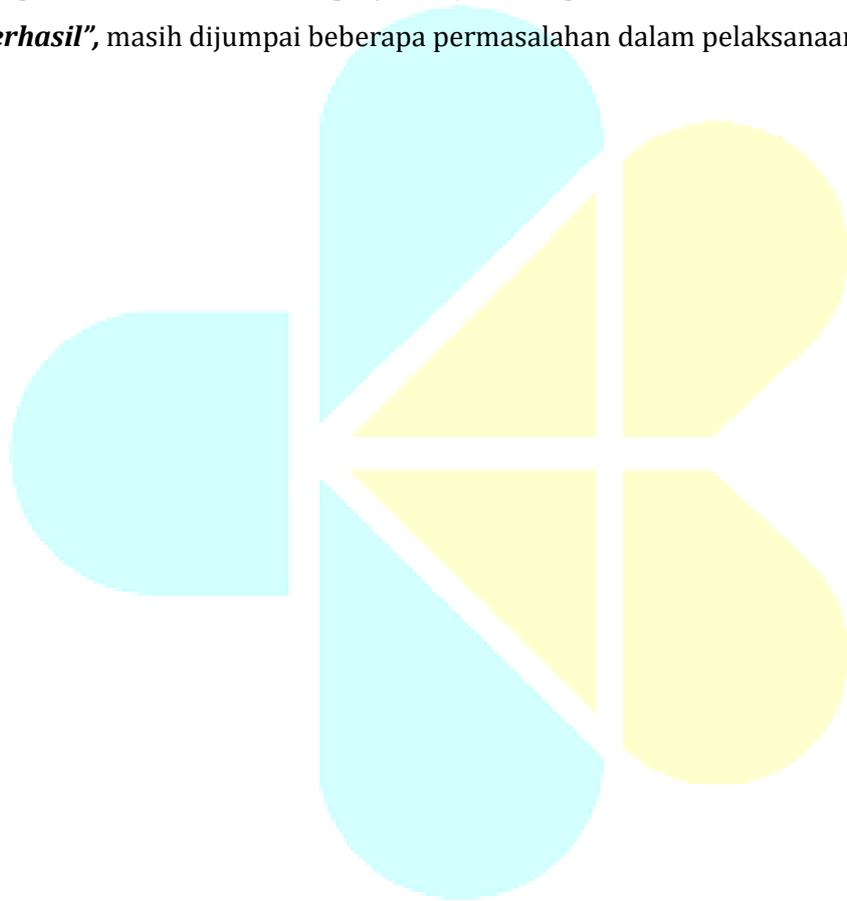
1. Belanja Operasi	:	Rp.	89.322.173.584,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	13.699.255.473,00
<b>Jumlah</b>			<b>103.021.429.057,00</b>

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja **131,65%** atau "**sangat berhasil**".

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	500 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	190,46%
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	151,96%
	3. Prevalensi balita stunting	7%	7,64%	90,86%
	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,20%	30,9%	203,29%
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65%	77,27%	118,88%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
	6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33%
<b>Meningkatkan kinerja perangkat daerah</b>	7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,08)	97,79
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>131,65%</b>

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **95,17%** dikategorikan "*sangat berhasil*", masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Dasar Hukum .....	4
E. Aspek-aspek Strategis .....	5
F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis 2021-2026 .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran .....	15
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 .....	17
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 .....	23
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra .....	25
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM) .....	25
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome) .....	27
1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan .....	38
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	38
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	44
C. Prestasi/Penghargaan .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Langkah Perbaikan .....	51

### Lampiran-Lampiran

- A. Matriks Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2023 .....	6
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2022 .....	6
Tabel 1.3	Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2023 .....	7
Tabel 1.4	Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2023 .....	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 .....	13
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 .....	17
Tabel 3.2	Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.3	Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021 – 2023 .....	22
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023 .....	24
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra .....	25
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur ....	26
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 .....	28
Tabel 3.8	Anggaran Belanja Langsung pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 .....	38
Tabel 3.9	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	39
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	44
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai peran membantu Walikota Blitar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Blitar berperan strategis dalam mewujudkan visi Pembangunan Kota Blitar 2021-2026, yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan, khususnya misi ke-2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan alat bantu dalam upaya perbaikan Dinas Kesehatan Kota Blitar secara berkesinambungan di masa yang akan datang dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas.

### B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa *output*

dan *outcome* beserta target tahunan yang jelas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- k. pengendalian penyakit, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- s. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- t. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- u. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- v. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
  16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
  17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar;
  19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
  20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
  21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
  24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

#### **E. Aspek-Aspek Strategis**

##### **1. Aspek Sumber Daya Manusia**

Jumlah SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar sampai dengan Oktober 2023 adalah sebanyak 261 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2023**

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Pejabat Fungsional	214
5.	Staf/Fungsional Umum	40
<b>Jumlah</b>		<b>261</b>

**Tabel 1.2**  
**Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2023**

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	24
2.	Golongan III	170
3.	Golongan II	38
4.	Golongan I	1
6.	PTT	7
5.	PPPK	21
<b>Jumlah</b>		<b>261</b>

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Blitar memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar maupun operasional UPT dibawahnya, yaitu UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

- a. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan di:  
Kantor utama yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi No. 61 Blitar.
- b. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang terletak di:
  - 1) UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Jalan Ciliwung No.178;
  - 2) UPT Puskesmas Sukorejo, Jalan Cemara No.163;
  - 3) UPT Puskesmas Sananwetan, Jalan Jawa No.07,

4) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Jalan Ciliwung No.180;

Sedangkan jumlah sarana kesehatan lainnya menurut kepemilikan, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2023**

No.	Fasilitas Kesehatan	Pemilik/Pengelola			Jumlah
		Pemerintah Daerah	TNI/ POLRI	Swasta	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit				
	Rumah Sakit Umum	1		4	5
	Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	Puskesmas Rawat Inap	0			0
	Puskesmas Non Rawat Inap	3			3
	Puskesmas Pembantu	17			17
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	Balai pengobatan/klinik		2	28	30
	Praktik Dokter Umum Perorangan			45	45
	Praktik Dokter Gigi Perorangan			29	29
	Praktik Dokter Spesialis Perorangan			22	22
	Praktik Pengobatan Tradisional			258	258
	Unit Tranfusi Daerah	1			1
4.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
	Apotek	1		57	58
	Toko Obat			7	7

Sumber : Data Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Blitar cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

### 3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

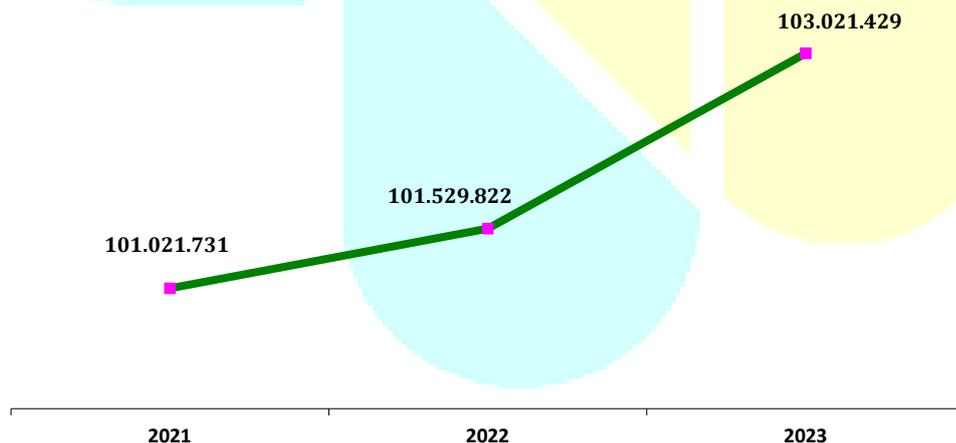
Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar**  
**Tahun 2021 - 2023**

No.	Uraian	Jumlah Anggaran		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Belanja Daerah:</b>			
	Dinas Kesehatan	91.977.390.357,00	92.942.335.842,00	93.901.357.444,00
	UPT PKM Kepanjenkidul	2.876.618.100,00	2.911.838.360,00	2.978.287.346,00
	UPT PKM Sukorejo	2.656.578.761,00	2.401.512.891,00	2.899.332.589,00
	UPT PKM Sananwetan	3.511.143.992,00	3.274.135.735,00	3.242.451.678,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>80.254.389.256,92</b>	<b>101.021.731.210,00</b>	<b>103.021.429.057,00</b>

Dari tabel diatas perkembangan pembiayaan kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Blitar untuk Pembiayaan Belanja langsung, dapat digambarkan dalam grafik berikut:

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan**  
**Tahun 2021-2023/000.**



Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Kota Blitar bersumber dana dari DID (Dana Insentif Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK-Kes (Dana Alokasi Khusus Kesehatan), DAK Non-Fisik (Dana Alokasi Khusus Non Fisik), DBHPR (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok), DBHCHT

(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan JKN-FKTP (Jaminan Kesehatan Nasional – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

#### **F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 3 orang;
2. Masih ada kematian bayi sebanyak 16 bayi;
3. Masih adanya balita stunting sebanyak 390 balita;
4. Belum tercapainya 100% Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terutama cakupan pelayanan kesehatan balita (58,81%) dan pelayanan kesehatan hipertensi (79,69%);
5. Masih rendahnya capaian fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (26,19%); dan
6. Masih rendahnya indeks keluarga sehat (0,35).

Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Blitar Tahun 2023, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peningkatan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
6. Peningkatan jumlah keluarga sehat.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun ke depan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah ***“Kota Blitar KEREN : Unggul, Makmur, Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan;

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital;
4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan;
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam ***"Lampiran. 1 LKj IP 2023: Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 – 2026"***.

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-2 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Tahun 2023 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

## KINERJA SASARAN 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

- Angka Kematian Ibu (AKI) 500 per-100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) 9,93 per-1.000 kelahiran hidup
- Prevalensi balita stunting 7 %
- Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 15,2 %
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 65%
- IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar 0,60 (skala)

## KINERJA SASARAN 2

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

A

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, serta dalam mempertanggungjawabkan kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 maka disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran**  
**Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Sekretariat	Laporan Sekretariat

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
2. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dan;
3. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Tim Kerja;

Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam **"Lampiran 3 LKjIP 2023"**.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran 2 LKjIP 2023"**.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah yang didukung dengan program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023.

Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023, serta membandingkan dengan target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

1. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing- masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	<b>85 % s.d 100 %</b>	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	<b>70 % s.d &lt; 85 %</b>	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3.	<b>55 % s.d &lt; 70 %</b>	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	<b>&lt; 55 %</b>	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

## 1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kesehatan Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja**  
**Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	500 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	190,46
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	151,96
	3. Prevalensi balita stunting	7%	7,64%	90,86
	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,2%	30,9	203,29
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65%	77,27%	118,88
	6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,08)	97,79

**Sasaran 1** “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”, merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per-100.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 1 kasus dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 2.097 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2023 sebesar 47,68 per-100.000 kelahiran hidup telah memenuhi target daerah sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 190,46%.

Kematian ibu sebanyak 1 kasus disebabkan oleh eklampsia. Kematian oleh karena eklampsia dikarenakan beberapa faktor antara lain ibu hamil dalam kondisi 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak), ibu disertai penyakit penyerta, dan adanya faktor medis dan non medis terkait (diagnosis, tatalaksana serta koordinasi antar tenaga kesehatan). Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian ibu Kota Blitar antara lain:

- Koordinas terkait pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC.
- Pendampingan oleh kader pendamping ibu hamil risti (risiko tinggi), ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
- Pendampingan oleh Tim Ahli (Sp.OG) ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal.
- Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyak kematian bayi usi 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 10 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 2.097. Maka AKB Kota Blitar tahun 2023 sebesar 4,77 per-1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 9,93 per-1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 151,96%.

Kasus kematian bayi di Kota Blitar disebabkan karena gagal nafas sebanyak 1 kasus, BBLR (berat badan lahir rendah) sebanyak 3 kasus, pneumonia 1 kasus, asfiksia sebanyak 1 kasus, sepsis 1 kasus, dan 10 kasus karena kelainan kongenital.

Status gizi dan penyakit penyerta ibu hamil dapat menjadi faktor risiko kematian pada bayi. Selain itu pemanfaatan alat kesehatan pertolongan kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (BBL) dan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan BBL yang belum optimal juga mempengaruhi peningkatan kasus kemaian bayi. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian bayi Kota Blitar antara lain:

- PSR (Pediatrician Social Responsibility) atau pendampingan tim ahli ke Puskesmas dalam pelayanan Kesehatan ibu dan anak (KIA), kegawatdaruratan dan sistem rujukan perinatal.
- Distribusi dan sosialisasi alat untuk skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) Kritis di seluruh Puskesmas.
- Monev Pelaksanaan Inovasi KATA SINONA (Kota Blitar Sigap Layani Neonatal).
- Skrining hipertiroid kongenital (SHK) pada seluruh bayi baru lahir, monev pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas.
- Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan bersama tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) tingkat Kota.

### 3. Prevalensi balita stunting

Prevalensi balita stunting dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%. Dalam capaian prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Indikator tersebut tercapai 90,86% yang berasal dari perhitungan target 7% dengan realisasi 7,64%.

**Tabel 3.2 Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2023**

NO	NAMA PUSKESMAS	SASARAN (S)	BALITA DITIMBANG (D)	SANGAT PENDEK	PENDEK	STUNTING	%
1	UPT PUSKESMAS SUKOREJO	3581	2215	51	119	170	7,67
2	UPT PUSKESMAS KEPANJENKIDUL	3371	1124	16	58	74	6,58
3	UPT PUSKESMAS SANANWETAN	3902	3030	44	199	243	8,02
	<b>JUMLAH</b>	<b>10854</b>	<b>6369</b>	<b>111</b>	<b>376</b>	<b>487</b>	<b>7,64</b>

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, ekonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

Status gizi ibu hamil sebagai risiko kelahiran bayi dengan kondisi stunting. Selain itu tingkat pendidikan, ekonomi, keadaan sosial, sanitasi, dan keterjangkauan pangan mempengaruhi status gizi keluarga juga mempengaruhi kejadian kasus stunting pada balita. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan prevalensi balita stunting Kota Blitar adalah dibutuhkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas OPD terkait pencegahan dan penanganan stunting, serta pertemuan evaluasi Intervensi Spesifik Stunting dan pendampingan balita stunting.

#### 4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perhitungan jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung dalam tahun yang sama.

Jumlah kunjungan baru di fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam dan luar gedung sebanyak 49.373 orang terhadap 159.781 orang penduduk Kota Blitar. Jadi cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebesar 30,9% dari target 15,2%.

Capaian kinerja indikator tersebut sudah sangat tinggi, sehingga dalam upaya pencapaian kinerja renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka

pada perencanaan tahun 2024 akan diupayakan perubahan target kinerja tahun 2025 dimajukan untuk tahun 2024.

#### 5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam pelayanan harus mengedepankan kualitas mutu pelayanan bagi masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan sesuai standar bagi masyarakat. Standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan dinilai melalui penilaian akreditasi fasyankes.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan, yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pembinaan dan penilaian akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Blitar dilaksanakan pada 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 12 Klinik, dan 7 Laboratorium Kesehatan. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 77,27% terdiri dari 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 7 Klinik, dan 1 Laboratorium Kesehatan yang sudah memiliki sertifikat akreditasi. Capaian tersebut melebihi target indikator sebesar 65%.

Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi akan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinkes kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mengikuti penilaian akreditasi.

#### 6. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan data per-31 Desember 2023 sebesar 0,41 masih kurang dari target daerah 0,60, yaitu dengan capaian 68,33% termasuk dalam kategori “**cukup berhasil**”. Kota Blitar termasuk dalam kategori “**keluarga tidak sehat**” dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar. Adapun nilai untuk masing-masing indikator Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar**  
**Tahun 2021 - 2023**

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)		
		2021	2022	2023
1.	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	44,83	54,49	61,20
2.	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	98,14	99,10	98,95
3.	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	98,26	99,28	99,27
4.	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,02	91,12	91,93
5.	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	96,25	97,51	97,49
6.	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	36,02	44,02	64,65
7.	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	27,81	37,23	39,72
8.	Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan	36,88	60,00	65,15
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	56,44	59,98	61,42
10.	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN)	57,12	65,52	73,06
11.	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	98,43	98,98	99,05
12.	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,22	98,63	98,77
<b>Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar</b>		<b>0,28</b>	<b>0,35</b>	<b>0,41</b>

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2023 naik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,13.

Dari tabel di atas, permasalahan pada capaian IKS adalah Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebesar 39,72%; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 64,65%; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 54,83%; Anggota keluarga tidak ada yang merokok 61,42%; dan Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan 65,15%.

Dalam pelaporan survei IKS Kota Blitar mengalami beberapa kendala antara lain data intervensi tahun 2023 belum optimal terlapor pada aplikasi PIS-PK, sehingga diperlukan *back up* pendataan dengan tetap memberikan intervensi kepada masyarakat dengan tingkat capaian indikator IKS yang masih rendah.

Sasaran 2 “Meningkatnya kinerja perangkat daerah”, merupakan indikator penunjang administrasi perangkat daerah, yaitu:

#### 7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 adalah 85,08 termasuk dalam kategori A dari target A (87) maka capaiannya sebesar 97,79%.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah:

- Melakukan pemenuhan bukti tindak lanjut atas monitoring pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan dengan serta mengungkapkan hasil evaluasi secara spesifik.
- Melakukan pemenuhan bukti tindak lanjut atas pengukuran kinerja secara periodik yang melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan.
- Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (*refocusing*) organisasi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
- Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
- Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- Memanfaatkan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022-2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	5	6	8	9	11	12
1.	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	AHH (Angka Harapan Hidup)	73,95	74,26	74,26	74,97	100,42	100,96
A.	<i>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</i>	Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	500 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	170,46	190,46
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	111,63	151,96
		Prevalensi balita stunting	7,05%	7%	5,26%	7,64%	125,39	90,86
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,1%	15,2%	34,62%	30,9%	229,27	203,29
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%	65%	26,19%	77,27%	58,2	118,88
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,50 (skala)	0,60 (skala)	0,35 (skala)	0,41 (skala)	70	68,33
2.	<b>Meningkatnya tata kelola perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Dina Kesehatan Kota Blitar</b>	<b>A (87)</b>	<b>A (87)</b>	A (86,61)	<b>A (85,08)</b>	<b>99,55</b>	<b>97,79</b>
B.	<i>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</i>	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (87)	A (86,61)	A (85,08)	99,55	97,79

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 terhadap target periode akhir Rencana Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	74,30	74,97	99,95
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	102,83
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	143,95
	Prevalensi balita stunting	6,80%	7,64%	87,64
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30%	30,9%	103
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terakreditasi	100%	77,27%	77,27
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,41 (skala)	48,24
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87,30)	A (85,08)	97,46

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)

Indikator pada Tujuan Renstra Dinas Kesehatan merupakan Indikator Derajat Kesehatan, data capaian yang diperoleh merupakan data tahun 2023. Dalam rangka pencapaian target renstra, Dinas Kesehatan didukung oleh pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun perbandingan realisasi

kinerja SPM Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan realisasi Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Realisasi Daerah Tahun 2023	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,72%	98,17%	+
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,49%	98,78%	+
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,74%	99,7%	+
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,91%	93%	+
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,15%	123,57%	+
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,21%	103,5%	+
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89,81%	97,7%	+
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,92%	102,8%	+

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Realisasi Daerah Tahun 2023	Ket.
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,84%	105,5%	+
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,44%	104,7%	+
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	103,66%	141,4%	+
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,93%	142,5%	+

*Keterangan : + realisasi daerah lebih besar dari realisasi provinsi  
- realisasi daerah lebih kecil dari realisasi provinsi*

## B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga) UPT Puskesmas, yaitu UPT Puskesmas Kepanjenkidul, UPT Puskesmas Sukorejo dan UPT Puskesmas Sananwetan. Pada tahun 2023 jumlah anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	:	Rp.	89.322.173.584,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	13.699.255.473,00
<b>Belanja Daerah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>103.021.429.057,00</b>

Dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 103.021.737.057,00 sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 98.049.737.638,70 (95,17%). Adapun

khusus untuk anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023**

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>93.901.357.444,00</b>	<b>90.475.644.639,70</b>	<b>96,35</b>
<b>I</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat</b>	<b>60.868.109.118,00</b>	<b>58.271.996.517,50</b>	<b>95,73</b>
	<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.548.693.429,00</b>	<b>13.369.260.306,00</b>	<b>91,89</b>
	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.523.017.250,00	7.250.496.625,00	96,38
	2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	861.891.300,00	812.052.000,00	94,22
	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.924.682.835,00	2.555.773.240,00	87,39
	4. Pengadaan Obat, Vaksin	1.365.158.673,00	1.324.210.795,00	97
	5. Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.744.427.520,00	1.298.525.146,00	74,44
	6. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129.515.851,00	128.202.500,00	98,99
	<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>46.102.424.896,00</b>	<b>44.713.180.007,50</b>	<b>96,99</b>
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154.805.436,00	153.948.636,00	99,45
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	194.461.202,00	183.961.047,00	94,60
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.590.000,00	4.840.000,00	73,44
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.184.916,00	23.184.916,00	100
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	86.343.500,00	86.030.484,00	99,64
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	215.890.417,00	200.360.574,00	92,81
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	48.189.000,00	48.188.010,00	100
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.078.600,00	21.078.600,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.168.525,00	4.168.525,00	100
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	77.001.247,00	77.001.247,00	100
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	49.899.133,00	48.749.133,00	97,70
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	284.250.660,00	283.869.416,00	99,87
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	28.226.589,00	28.226.589,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	22.443.795,00	22.443.795,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.457.115.832,00	1.987.177.441,00	80,87
	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	62.030.500,00	61.389.150,00	98,97
	18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	185.475.679,00	166.712.480,00	89,88
	19. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	207.309.557,00	207.173.368,00	99,93
	20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.300.000,00	8.800.000,00	94,62
	21. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	85.506.620,00	84.697.544,00	99,05
	22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.429.500,00	4.429.500,00	100
	23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	13.175.701,00	13.175.701,00	100
	24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	644.289.059,00	638.122.132,00	99,04
	25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.828.974.028,00	30.361.219.150,00	98,48
	26. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	141.000.000,00	59.108.700,00	41,92
	27. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	145.727.800,00	144.495.630,00	99,15
	28. Operasional Pelayanan Puskesmas	9.178.335.126,00	8.917.453.568,50	97,16
	29. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	331.612.903,00	306.554.423,00	92,44
	30. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	142.176.000,00	133.472.552,00	93,88
	31. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	261.165.126,00	255.173.126,00	97,71
	32. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	38.289.978,00	38.289.978,00	100
	33. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	109.305.014,00	100.956.514,00	92,36
	34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	40.673.453,00	38.728.078,00	95,22
	<b>c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>70.444.793,00</b>	<b>70.228.380,00</b>	<b>99,69</b>
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	70.444.793,00	70.228.380,00	99,69
	<b>d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>146.546.000,00</b>	<b>119.327.824,00</b>	<b>81,43</b>
	1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	138.896.000,00	111.677.824,00	80,40
	2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.650.000,00	7.650.000,00	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>881.094.486,00</b>	<b>878.463.254,00</b>	<b>99,70</b>
	<b>a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.596.900,00</b>	<b>53.952.000,00</b>	<b>98,82</b>
	1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	54.596.900,00	53.952.000,00	98,82

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	<b>b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>172.367.586,00</b>	<b>171.221.654,00</b>	<b>99,34</b>
	1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	172.367.586,00	171.221.654,00	99,34
	<b>c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>654.130.000,00</b>	<b>653.289.600,00</b>	<b>99,87</b>
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	654.130.000,00	653.289.600,00	99,87
<b>III</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>408.532.303,00</b>	<b>402.773.242,00</b>	<b>98,59</b>
	<b>a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>98.440.303,00</b>	<b>98.440.303,00</b>	<b>100</b>
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	26.224.200,00	26.224.200,00	11
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	72.216.103,00	72.216.103,00	99,99
	<b>b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>155.050.000,00</b>	<b>152.723.100,00</b>	<b>98,5</b>
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.050.000,00	152.723.100,00	98,5
	<b>c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>155.042.000,00</b>	<b>151.614.700,00</b>	<b>97,79</b>
	1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	155.042.000,00	151.614.700,00	97,79
<b>IV</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>3.674.746.234,00</b>	<b>3.641.021.038,00</b>	<b>99,08</b>
	<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.459.276.682,00</b>	<b>3.448.742.217,00</b>	<b>99,7</b>
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.459.276.682,00	3.448.742.217,00	99,7

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	
	<b>c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>215.469.552,00</b>	<b>192.278.821,00</b>	<b>89,24</b>
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	215.469.552,00	192.278.821,00	89,24
<b>V</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.068.875.303,00</b>	<b>27.281.390.588,20</b>	<b>97,19</b>
	<b>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.526.973,00</b>	<b>56.850.779,00</b>	<b>98,82</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.867.328,00	27.867.224,00	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.659.645,00	28.983.555,00	97,72
	<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>23.476.826.027,00</b>	<b>22.790.284.629,00</b>	<b>97,08</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.457.746.027,00	22.771.204.629,00	97,07
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.080.000,00	19.080.000,00	100
	<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>264.006.129,00</b>	<b>245.844.953,00</b>	<b>93,12</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	123.130.000,00	110.490.000,00	89,73
	2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.660.000,00	10.659.754,00	100
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130.216.129,00	124.695.199,00	95,76
	<b>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>889.449.219,00</b>	<b>863.764.013,00</b>	<b>97,11</b>
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.068.554,00	11.068.554,00	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.737.054,00	40.692.340,00	99,89
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.234.848,00	20.188.640,00	99,77
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.145.100,00	46.125.500,00	99,96
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.595.875,00	63.549.352,00	99,93
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.180.000,00	9.180.000,00	100
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.661.800,00	539.578.127,00	95,56
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	133.825.988,00	133.381.500,00	99,67
	<b>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>384.375.997,00</b>	<b>368.280.000,00</b>	<b>95,81</b>
	1. Pengadaan Mebel	27.500.000,00	27.130.000,00	98,65
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	356.875.997,00	341.150.000,00	95,59
	<b>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.268.295.903,00</b>	<b>2.244.156.874,20</b>	<b>98,94</b>
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.395.100,00	274.634.529,00	97,25
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.985.900.803,00	1.969.522.345,20	99,18
	<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>728.395.055,00</b>	<b>712.209.340,00</b>	<b>97,78</b>

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.643.286,00	235.861.040,00	97,20
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.759.769,00	73.699.543,00	99,92
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	411.992.000,00	402.648.757,00	97,73
<b>UPT Puskesmas Kepanjenkidul</b>		<b>2.978.287.346,00</b>	<b>2.675.693.665,00</b>	<b>89,84</b>
<b>I</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>2.906.091.746,00</b>	<b>2.609.305.037,00</b>	<b>89,79</b>
	<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>403.344.073,00</b>	<b>396.229.150,00</b>	<b>98,24</b>
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	116.925.279,00	112.288.900,00	96,03
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	68.174.657,00	68.172.000,00	100
	3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	159.904.137,00	158.492.450,00	99,12
	4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.340.000,00	57.275.800,00	98,18
	<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.502.747.673,00</b>	<b>2.213.075.887,00</b>	<b>88,43</b>
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.572.050,00	19.300.300,00	93,82
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.132.176,00	7.095.000,00	99,48
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.258.400,00	2.258.000,00	99,98
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.859.730,00	9.777.000,00	99,16
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.390.800,00	23.366.500,00	99,90
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	70.210.261,00	69.596.700,00	99,13
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.201.500,00	10.962.500,00	89,85
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.817.316,00	19.817.100,00	100,00
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.276.726,00	5.125.000,00	97,12
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	41.917.658,00	35.658.700,00	85,07
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	51.275.687,00	51.015.800,00	99,49
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.479.507,00	40.799.500,00	96,05
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.240.106,00	1.240.000,00	99,99
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	529.787.073,00	388.284.650,00	73,29
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.037.500,00	14.037.500,00	100,00
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.060.000,00	20.959.600,00	99,52

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92.764.377,00	89.391.800,00	96,36
	18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	626.000,00	300.000,00	47,92
	19. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	204.591.266,00	196.673.400,00	96,13
	20. Operasional Pelayanan Puskesmas	1.321.799.275,00	1.196.991.837,00	90,56
	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	10.450.265,00	10.425.000,00	99,76
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>72.195.600,00</b>	<b>66.388.628,00</b>	<b>91,96</b>
	<b>a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>72.195.600,00</b>	<b>66.388.628,00</b>	<b>91,96</b>
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	72.195.600,00	66.388.628,00	91,96
<b>UPT Puskesmas Sukorejo</b>		<b>2.899.332.589,00</b>	<b>2.052.196.653,00</b>	<b>70,78</b>
<b>I</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>2.828.564.240,00</b>	<b>1.999.405.607,00</b>	<b>70,69</b>
	<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>438.788.589,00</b>	<b>379.147.594,00</b>	<b>86,41</b>
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	102.147.311,00	97.013.532,00	94,97
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	93.856.738,00	93.492.067,00	99,61
	3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	184.474.540,00	130.642.695,00	70,82
	4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.310.000,00	57.999.300,00	99,47
	<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.389.775.651,00</b>	<b>1.620.258.013,00</b>	<b>67,8</b>
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.932.710,00	63.359.710,00	99,1
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	130.008.620,00	118.829.188,00	91,40
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.759.432,00	8.759.432,00	100
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	49.605.129,00	49.605.129,00	100
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	53.914.259,00	53.914.259,00	100
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52.045.443,00	48.001.304,00	92,23
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	58.908.714,00	58.908.714,00	100
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	108.299.316,00	107.339.001,00	99,11
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	77.297.000,00	76.847.000,00	99,42
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	37.829.800,00	36.624.800,00	96,81
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	631.873.272,00	331.340.400,00	52,44
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.474.278,00	20.659.178,00	96,20

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	13. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	127.977.830,00	51.199.352,00	40,01
	14. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.912.070,00	1.676.200,00	28,35
	15. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.319.960,00	61.706.560,00	75,88
	16. Operasional Pelayanan Puskesmas	880.617.818,00	531.487.786,00	60,35
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>70.768.349,00</b>	<b>52.791.046,00</b>	<b>74,60</b>
	<b>a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.768.349,00</b>	<b>52.791.046,00</b>	<b>74,60</b>
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	70.768.349,00	52.791.046,00	74,60
	<b>UPT Puskesmas Sananwetan</b>	<b>3.242.451.678,00</b>	<b>2.996.564.977,00</b>	<b>92,42</b>
<b>I</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>3.111.101.601,00</b>	<b>2.871.494.967,00</b>	<b>92,30</b>
	<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>573.137.678,00</b>	<b>565.070.381,00</b>	<b>98,59</b>
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.665.755,00	45.513.800,00	93,52
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	120.650.617,00	120.583.695,00	99,94
	3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	345.471.306,00	340.755.386,00	98,63
	4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.350.000,00	58.217.500,00	99,77
	<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.537.963.923,00</b>	<b>2.306.424.586,00</b>	<b>90,88</b>
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.809.920,00	58.393.728,00	96,03
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.094.980,00	5.094.980,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	21.492.849,00	21.470.000,00	99,89
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	314.993.782,00	312.640.360,00	99,25
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.895.737,00	54.430.937,00	99,15
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.317.467,00	37.299.487,00	99,95
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	127.178.900,00	127.151.500,00	99,98
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.225.000,00	1.225.000,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.203.500,00	12.943.500,00	98,03
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	62.974.720,00	48.238.000,00	76,60
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	95.665.630,00	92.370.143,00	96,56
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.971.161,00	42.763.000,00	99,52
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	490.750.687,00	362.692.771,00	73,91

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.898.400,00	29.349.400,00	113,33
15.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	41.142.187,00	40.823.500,00	99,23
16.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	626.000,00	626.000,00	100
17.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103.742.500,00	92.450.150,00	89,12
18.	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.037.980.503,00	966.462.130,00	93,11
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>131.350.077,00</b>	<b>125.070.010,00</b>	<b>95,22</b>
a.	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>131.350.077,00</b>	<b>125.070.010,00</b>	<b>95,22</b>
1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	131.350.077,00	125.070.010,00	95,22
<b>JUMLAH TOTAL DINAS KESEHATAN</b>		<b>103.021.429.057,00</b>	<b>98.049.737.638,70</b>	<b>95,17</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 98.049.737.638,70** dari total anggaran sebesar **Rp. 103.021.429.057,00** atau sebesar **95,17%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2023 termasuk **“sangat berhasil”**.

Secara umum kinerja keuangan per-program sudah baik, ada beberapa aktivitas kegiatan yang tidak terealisasi pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan realisasi sebesar 74,44% dikarenakan harga barang sesuai dengan e-catalogue dimana lebih rendah dibandingkan standar harga pada perencanaan. Sebagai upaya tindak lanjut yaitu pengusulan standar harga yang disesuaikan dengan e-catalogue terbaru.
  - b. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan realisasi sebesar 41,92% dikarenakan realisasi sesuai penemuan jumlah kasus berpotensi KLB pada tahun 2023.

Sedangkan capaian Kinerja Program, sebagai berikut:

Program Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	98,17%	98,17	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	98,78%	98,78	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	99,7%	99,7	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	93%	93	Belum rutusnya pelaporan dari lembaga PAUD dan TK/RA, diperlukan pendampingan dan pembinaan rutin pelaporan pada lembaga PAUD dan TK/RA oleh Puskesmas
Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	123,57%	123,57	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	103,5%	103,5	
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	97,7%	97,7	
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	102,8%	102,8	
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	105,5%	105,5	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	104,7%	104,7	
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	141,4%	141,4	

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	142,5%	142,5
Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100
Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,2%	100%	105,04
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100
Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	63%	69,82%	101,82
Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	26%	46,15%	177,5
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%

## 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%
Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	85%	92,67%	109,02%

## 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	57,14%	85,71%	150%

Program Non Urusan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,9	83,3%	100,48%

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran ( Rp )	% Anggaran
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	506.808.474,00	0,49
		Angka Kematian Balita (AKB)	30.341.249,00	0,03
		Prevalensi Balita Stunting	4.587.573.912,00	4,45
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	47.815.794.591,00	46,39
		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	18.062.975.268,00	17,53
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	3.949.060.260,00	3,83
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kota Blitar	28.068.875.303,00	27,26
<b>Jumlah</b>			<b>103.021.429.057,00</b>	<b>100</b>

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
<b>A. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Angka Kematian Ibu (AKI)</b>	<b>500 per-100.000 kelahiran hidup</b>	<b>47,68 per-100.000 kelahiran hidup</b>	<b>190,46%</b>	<b>506.808.474,00</b>	<b>491.153.401,00</b>	<b>96,91%</b>
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	98,17%	98,17%	506.808.474,00	491.153.401,00	96,91%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	98,78%	98,78%			
<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Angka Kematian Bayi (AKB)</b>	<b>9,93 per-1.000 kelahiran hidup</b>	<b>4,77 per-1.000 kelahiran hidup</b>	<b>151,96%</b>	<b>30.341.249,00</b>	<b>28.568.000,00</b>	<b>94,16%</b>
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	99,7%	99,7%	30.341.249,00	28.568.000,00	94,16%
<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Prevalensi balita stunting</b>	<b>7%</b>	<b>7,64%</b>	<b>90,86%</b>	<b>4.587.573.912,00</b>	<b>3.533.926.726,00</b>	<b>77,03%</b>

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	93%	93%	4.587.573.912,00	3.533.926.726,00	77,03%
	Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%			
<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>15,20%</b>	<b>30,9%</b>	<b>203,29%</b>	<b>47.815.794.591,00</b>	<b>46.099.144.581,50</b>	<b>96,41%</b>
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	123,57%	123,57%	47.815.794.591,00	46.099.144.581,50	96,41%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	103,5%	103,5%			
	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	97,7%	97,7%			
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	102,8%	102,8%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	105,5%	105,5%			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	104,7%	104,7%			
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	141,4%	141,4%			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	142,5%	142,5%			
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%			
	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,2%	100%	105,04%			
	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	63%	69,82%	110,82%			
	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	26%	46,15%	177,5%			
<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi</b>	<b>65%</b>	<b>77,27%</b>	<b>118,88%</b>	<b>18.062.975.268,00</b>	<b>16.730.283.620,00</b>	<b>92,62%</b>
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	16.773.348.479,00	10.311.079.459,36	92,10%
2. Program Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	881.094.486,00	878.463.254,00	99,70%
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%	408.532.303,00	402.773.242,00	98,59%
	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	85%	92,67%	109,02%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar</b>	<b>0,60</b>	<b>0,41</b>	<b>68,33%</b>	<b>3.721.610.800,00</b>	<b>3.949.060.260,00</b>	<b>98,38%</b>
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	57,14%	85,71%	150%	3.721.610.800,00	3.885.270.722,00	98,38%
<b>B. Meningkatnya kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar</b>	<b>A (87)</b>	<b>A (85,08)</b>	<b>97,79%</b>	<b>28.068.875.303,00</b>	<b>27.281.390.588,20</b>	<b>97,19%</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,9	83,3	100,48%	28.068.875.303,00	27.281.390.588,20	97,19%
<b>Total</b>					<b>103.021.429.057,00</b>	<b>98.049.737.638,70</b>	<b>95,17</b>

### 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Ket.
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	190,46	96,91	1,96	Efisien
		Angka Kematian Bayi (AKB)	151,96	94,16	1,61	Efisien
		Prevalensi balita stunting	90,86	77,03	1,18	Efisien
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	203,29	96,41	2,11	Efisien
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	118,88	92,62	1,28	Efisien
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	68,33	95,38	0,72	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	97,79	97,19	1,01	Efisien

Tingkat efisien capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2023 ada enam indikator kinerja sasaran yang efisien dan satu indikator kinerja sasaran yang tidak efisien.

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,96. Jumlah kematian ibu berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin dan ibu bersalin yang sesuai standar dapat dibuktikan dengan pencapaian akreditasi

puskesmas se-Kota Blitar pada kategori Paripurna. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada kesehatan ibu hamil dan bersalin dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan dan kesehatan ibu hamil dan bersalin.

2. Angka Kematian Bayi (AKB) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,61. Jumlah kematian bayi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas penanganan bayi baru lahir sampai usia 28 hari yang sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir sampai usia 28 hari dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan bayi baru lahir.
3. Prevalensi balita stunting dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18. Prevalensi balita stunting tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga akan dilakukan upaya tindak lanjutnya berupa kerjasama dengan lintas sektor dalam peningkatan kualitas hidup yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain, ekonomi, pendidikan dan sosial. Realisasi anggaran yang rendah dikarenakan penyesuaian harga pengadaan alat antropometri dengan harga pada e-katalog.
4. Cakupan pelayanan kesehatan Masyarakat dengan tingkat efisiensi 2,11. Pencapaian kinerja terhadap capaian pelayanan kesehatan jauh lebih besar daripada target. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik pada kondisi sakit maupun kondisi sehat dalam rangka preventif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dengan tingkat efisiensi 1,28. Jumlah fasyankes yang terakreditasi pada tahun 2023 lebih banyak dari pada target dikarenakan adanya perubahan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar, tingkat efisiensi sebesar 0,72. Hal tersebut dikarenakan capaian kinerja IKS Kota Blitar lebih rendah dari pada target yang ditetapkan. Walaupun demikian, capaian IKS Kota Blitar tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Maka, penyerapan anggaran sebagai upaya peningkatan IKS Kota Blitar cukup berhasil dalam upaya

peningkatan capaian IKS Kota Blitar. Pelaksanaan intervensi terhadap keluarga dengan kriteria yang belum memenuhi syarat adalah upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan IKS Kota Blitar. Selain itu, permasalahan dalam pelaporan IKS adalah belum terupdatenya data pada aplikasi PIS-PK, sehingga akan dilaksanakan upaya pelaporan manual terhadap capaian IKS yang belum terupdate pada aplikasi PIS-PK.

7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan tingkat efisiensi 1,01. Pencapaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan kategori A tidak luput dari peran serta seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam upaya pencapaian kinerja OPD, serta keterlibatan OPD terkait dalam peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

### **C. Prestasi/Penghargaan**

Pada Tahun 2022, ada 4 (empat) penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu:

1. Penghargaan Kota Sehat “Swasti Saba Wistara” ke-4 Tahun 2023.

Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kab/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah

Manfaat dari penyelenggaraan KKS adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kab/kota yang berwawasan kesehatan berkelanjutan antara lain:

- a. Meningkatnya masyarakat hidup sehat.
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan (kab/kota, tempat pengolahan makanan/tempat dan fasilitas umum/fasilitas pelayanan kesehatan sehat, air minum aman, kualitas udara indoor, rumah sehat),
- c. Penurunan kejadian penyakit menular dan tidak menular
- d. Peningkatan peran masyarakat dan swasta peduli Kesehatan
- e. Layanan fasilitas 9 tatanan kab/kota yang yang terstandar

Terhadap Kabupaten Kota Sehat, diberikan penghargaan “SWASTI SABA” yang diserahkan di bulan November. Penghargaan ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. PENGHARGAAN PADAPA, untuk klasifikasi pemantapan jika mengikuti penilaian minimal 2 tatanan
- b. PENGHARGAAN WIWERDA, untuk klasifikasi pembinaan jika mengikuti penilaian minimal 3 atau 4 tatanan
- c. PENGHARGAAN WISTARA, untuk klasifikasi pengembangan jika mengikuti penilaian lebih dari 5 tatanan

Terdapat 9 tatanan dalam kabupaten kota sehat, yaitu :

- a. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum yang sehat
  - b. Kawasan sarana tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi yang sehat
  - c. Kawasan industri dan perkantoran yang sehat
  - d. Ketahanan pangan dan gizi
  - e. Kehidupan masyarakat yang sehat yang mandiri
  - f. Kehidupan sosial yang sehat
  - g. Lingkungan pemukiman yang sehat
  - h. Lingkungan kerja yang sehat
  - i. Ketahanan bencana
2. Juara Kategori Madya dan Utama Tingkat Nasional APKESMI UPT Puskesmas Sukorejo Tahun 2023.
  3. Penghargaan Kota Blitar dalam pemanfaatan Vaksin Covid-19 Inavac Tahun 2023.
  4. Penghargaan kepada UPT Puskesmas Kepanjenkidul Terbaik 1 pencapaian Program Rujuk Balik Aktif Terbanyak oleh BPJS Kesehatan Tahun 2023.
  5. Penghargaan kepada UPT Puskesmas Sukorejo Terbaik 1 pencapaian Kapitasi Berbasis Kinerja 100% oleh BPJS Kesehatan Tahun 2023.
  6. Keberhasilan Kota Blitar mencapai NPAFP Rate tahun 2023.
  7. Keberhasilan Puskesmas se-Kota Blitar meraih predikat Akreditasi Paripurna pada tahun 2023.
  8. Penghargaan SAKIP OPD Kategori A Kota Blitar Tahun 2023.
  9. Peran serta Dinas Kesehatan dalam peraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori **Madya**
- Kota Layak Anak merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak, hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik. Setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak.

Penghargaan KLA ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA). Sedangkan untuk kategori KLA ini ada 5 (lima) yaitu :

- a. Kategori Pratama
- b. Kategori Madya
- c. Kategori Nindya
- d. Kategori Utama
- e. Kategori KLA

Kriteria penilaian evaluasi KLA ini meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Hak sipil dan kebebasan
- c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- d. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
- e. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
- f. Hak perlindungan khusus

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	500 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	190,46%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	151,96%
	Prevalensi balita stunting	7%	7,64%	90,86%
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,20%	30,9%	203,29%
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65%	77,27%	118,88%
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat	0,60	0,41	68,33%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,08)	97,79%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>131,65%</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar

tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 131,65% atau "**sangat berhasil**".

Akuntabilitas kinerja tinggi dengan 4 (enam) dari 7 (tujuh) indikator sasaran mencapai target. Adapun 3 (tiga) indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu (1) Prevalensi balita stunting masih belum mencapai target karena pada tahun 2023 jumlah balita stunting bertambah dibanding tahun sebelumnya; (2) IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat karena masih ada indikator IKS yang belum tercapai yaitu Indikator KB, TBC, hipertensi, ODGJ, dan merokok masih rendah sehingga perlu peningkatan intervensi; dan (3) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **95,17%** dikategorikan "**sangat berhasil**", seperti pada tabel di bawah ini, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>						
Angka Kematian Ibu (AKI)	500 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	190,46%	506.808.474,00	491.153.401,00	96,91%
Angka Kematian Bayi (AKB)	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	151,96%	30.341.249,00	28.568.000,00	94,16%
Prevalensi balita stunting	7%	7,64%	90,86%	4.587.573.912,00	3.533.926.726,00	77,03%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,20%	30,9%	203,29%	47.815.794.591,00	46.099.144.581,50	96,41%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65%	77,27%	118,88%	18.062.975.268,00	16.730.283.620,00	92,62%
IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,60	0,41	68,33%	3.949.060.260,00	3.885.270.722,00	98,38%
<b>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</b>						
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,08)	97,79%	28.068.875.303,00	27.281.390.588,20	97,19%
<b>Total</b>				<b>103.021.429.057,00</b>	<b>98.049.737.638,70</b>	<b>95,17</b>

## B. Langkah Perbaikan

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar upaya yang harus dilakukan:

**Tabel 4.1**

**Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2023**

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1.	Mengurangi jumlah kematian ibu	Melaksanakan rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil dan ANC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> </ul>	√		
		Melaksanakan pendampingan Kader Pendamping Ibu Hamil Risti, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan BBL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah</li> <li>• Sub. Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> </ul>	√		
		Melaksanakan pendampingan Tim Ahli (Sp. OG) ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</li> <li>• Keg. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>	√		
		Melaksanakan audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub Keg. Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li> </ul>			
2.	Mengurangi jumlah kematian bayi	PSR (Pediatrician Social Responsibility)- Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Perinatal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</li> <li>• Keg. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>	√		
		Monev Pelaksanaan Inovasi KATA SINONA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> </ul>		√	
		Monev Pelayanan MTBM dan MTBS di Puskesmas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> </ul>		√	
		Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan bersama tim AMP-SR tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan</li> </ul>	√		

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Keg. Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li> </ul>			
3.	Menurunkan prevalensi balita stunting	Rakor linsek lintas OPD terkait pencegahan dan penanganan stunting, pertemuan evaluasi Intervensi Spesifik Stunting, pendampingan balita stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub Keg. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat</li> </ul>	√		√
4.	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan	Berkoordinasi dengan jejaring terkait pengiriman data jumlah kunjungan dan mengupayakan semua faskes sudah ber-RME (Rekam Medik Elektronik) tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</li> <li>• Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> </ul>	√		
5.	Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Pembinaan dan pendampingan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinkes kepada fasyankes yang akan mengikuti penilaian akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sub Keg. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</li> </ul>	√		
6.	Meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Tetap melakukan intervensi KS dengan melibatkan lintas program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	√		

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</li> </ul>			

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

KEMALA DINAS KESEHATAN  
 PEMERINTAH KOTA BLITAR  
 DINAS KESEHATAN  
 dr. DHARMA SETIAWAN, M.Kes.  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19680305 200112 1 003

**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR  
TAHUN 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN									SASARAN							CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET						STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,75 tahun	73,95 tahun	74,26 tahun	74,27 tahun	74,29 tahun	74,30 tahun	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali Konstanta (100.000) bayi lahir hidup	189,13 per-100.000 kelahiran hidup	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	500 per-100.000 kelahiran hidup	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	a. peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan b. peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan c. peningkatan kunjungan K1 dan K4	
										Angka kematian Bayi (AKB)	Jumlah Kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	11,82 per-1.000 kelahiran hidup	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	8,98 per-1.000 kelahiran hidup	8,51 per-1.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	a. Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) b. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) c. Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) d. peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang	
										Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	7,25%	7,05%	7%	6,95%	6,90%	6,80%	Peningkatan penanganan stunting	a. Pemenuhan gizi ibu hamil b. Peningkatan gizi balita	

TUJUAN									SASARAN							CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET						STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
										Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	NA	15,10%	15,2%	28%	29%	30%	Peningkatan pelayanan kesehatan	a. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan b. Peningkatan sistem pelayanan rujukan c. Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit d. Peningkatan layanan kegawatdaruratan e. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan f. Pengembangan layanan <i>home care</i>	
																		Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	a. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular b. Peningkatan pengetahuan tentang PHBS	
										Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	45%	45%	65%	75%	85%	100%	Peningkatan akreditasi fasyankes	a. Peningkatan pembinaan akreditasi fasyankes b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	
										IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,24 (skala)	0,50 (skala)	0,60 (skala)	0,70 (skala)	0,80 (skala)	0,85 (skala)	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui program-program kesehatan di fasilitas pelayanan	

TUJUAN									SASARAN							CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET						STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar		A	A (87)				Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A	A (87)	A (87)	A (87,10)	A (87,20)	A (87,30)	Peningkatan kinerja perangkat daerah	a. Peningkatan sarana prasarana perkantoran b. Peningkatan koordinasi antar bidang dan lintas sektor	

Blitar, 5 Februari 2024  
**KEMALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA BLITAR**  
  
**dr. PHARMA SETIAWAN, M.MKes.**  
 NIP. 196803052001121003

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	500 per-100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2235 orang	154.805.436	DINKES
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	642 orang	20.572.050	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	758 orang	63.932.710	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	835 orang	60.809.920	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.134 orang	194.461.202	Dinkes
											Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	613 orang	7.132.176	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	797 orang	5.094.980	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN											
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
		Angka kematian Bayi (AKB)	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.032 orang	6.590.000	Dinkes							
											Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	582 bayi	2.258.400	UPT Puskesmas Kepanjenkidul							
											Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	756 orang	21.492.849	UPT Puskesmas Sananwetan							
			Prevalensi balita stunting	7%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.252 orang	23.184.916	Dinkes						
												Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.999 orang	9.859.730	UPT Puskesmas Kepanjenkidul						
												Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.578 orang	130.008.620	UPT Puskesmas Sukorejo						
												Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.071 orang	314.993.782	UPT Puskesmas Sananwetan						
												Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi intervensi Gizi sensitif	3 fasilitasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 dokumen	2.457.115.832	Dinkes
															Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 dokumen	529.787.073	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	631.873.272	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 dokumen	490.750.687	UPT Puskesmas Sananwetan
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,20%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.600 orang	86.343.500	Dinkes
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.038 orang	23.390.800	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.010 orang	8.759.432	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.552 orang	54.895.737	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92.692 orang	215.890.417	Dinkes
											Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.542 orang	70.210.261	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.645 orang	49.605.129	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34.505 orang	37.317.467	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	3 dokumen	13.175.701	Dinkes
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.826 orang	48.189.000	Dinkes
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.538 orang	12.201.500	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.789 orang	53.914.259	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.499 orang	127.178.900	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47.016 orang	21.078.600	Dinkes
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.463 orang	19.817.316	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16.050 orang	52.045.443	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.503 orang	1.225.000	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.274 orang	4.168.525	Dinkes
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.224 orang	5.276.726	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.459 orang	58.908.714	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.591 orang	13.203.500	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	379 orang	77.001.247	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	108 orang	41.917.658	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	129 orang	108.299.316	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	141 orang	62.974.720	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10 orang	4.429.500	Dinkes
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2.887 orang	49.899.133	Dinkes
											Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.163 orang	51.275.687	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	948 orang	77.297.000	UPT Puskesmas Sukorejo

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	776 orang	95.665.630	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3.389 orang	284.250.660	Dinkes
											Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	970 orang	42.479.507	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.157 orang	37.829.800	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.262 orang	42.971.161	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 dokumen	30.828.974.028	Dinkes
								Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%					
										Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 dokumen	9.178.335.126	Dinkes
											Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	2 dokumen	1.321.799.275	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	16 dokumen	880.617.818	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.037.980.503	UPT Puskesmas Sananwetan
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,2%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	90,3%	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 laporan	261.165.126	Dinkes
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 dokumen	28.226.589	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 dokumen	1.240.106	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
										Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 dokumen	85.506.620	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 dokumen	626.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	5.912.070	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 dokumen	626.000	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	644.289.059	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	204.591.266	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	81.319.960	UPT Puskesmas Sukorejo	
											Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	103.742.500	UPT Puskesmas Sananwetan	
										Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	1.540 paket	141.000.000	Dinkes	
										Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 dokumen	38.289.978	Dinkes	
									Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 dokumen	22.443.795	Dinkes
					Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	63%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	67%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen	185.475.679	Dinkes	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
								Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,3%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 dokumen	21.060.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
								Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	52,38%					
								Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8 dokumen	145.727.800	Dinkes
								Persentase program prioritas yang dipromosikan	100%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 dokumen	207.309.557	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	92.764.377	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	127.977.830	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	41.142.187	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	8.056 keluarga	40.673.453	Dinkes
											Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	50 keluarga	10.450.265	UPT Puskesmas Kepanjenkidul

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	26%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pos UKK yang terbina	9 Pos UKK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 dokumen	62.030.500	Dinkes
								Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	45%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen	14.037.500	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	13%		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen	21.474.278	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 dokumen	25.898.400	UPT Puskesmas Sananwetan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	100%	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	6 dokumen	331.612.903	Dinkes
										Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	13 unit	142.176.000	Dinkes
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	4%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	3 dokumen	9.300.000	Dinkes
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	109.305.014	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 unit	7.523.017.250	Dinkes
										Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas kesehatan yang disediakan	1 unit	861.891.300	Dinkes
										Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	190 unit	2.924.682.835	Dinkes
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 unit	116.925.279	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 unit	102.147.311	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8 unit	48.665.755	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	260 unit	129.515.851	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	54 unit	58.340.000	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	75 unit	58.310.000	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	58 unit	58.350.000	UPT Puskesmas Sananwetan
								Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3 paket	1.365.158.673	Dinkes
											Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 paket	68.174.657	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	2 paket	93.856.738	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3 paket	120.650.617	UPT Puskesmas Sananwetan
										Pengadaan Bahan Pakai Habis	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 paket	1.744.427.520	Dinkes
											Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6 paket	159.904.137	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	2 paket	184.474.540	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	7 paket	345.471.306	UPT Puskesmas Sananwetan
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3 dokumen	70.444.793	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	138.896.000	Dinkes
										Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	7.650.000	Dinkes
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	270 dokumen	54.596.900	Dinkes
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	4 dokumen	172.367.586	Dinkes
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	13%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	20 orang	654.130.000	Dinkes
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kes., dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	5 dokumen	26.224.200	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 sarana	72.216.103	Dinkes
									92%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	2 dokumen	155.050.000	Dinkes
									92%	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	40 unit	155.042.000	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	61,9%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	53%	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	3.459.276.682	Dinkes
								Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	94,61%					
								Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	54%					
								Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibangun	3 kelompok UKBM					
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	215.469.552	Dinkes
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	72.195.600	UPT Puskesmas Kepanjenkidul
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	70.768.349	UPT Puskesmas Sukorejo
											Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	131.350.077	UPT Puskesmas Sananwetan

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dokumen	27.867.328	Dinkes			
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 laporan	29.659.645	Dinkes			
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	246 orang/bulan	23.457.746.027	Dinkes
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	19.080.000	Dinkes
													Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	123.130.000	Dinkes
													Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 dokumen	10.660.000	Dinkes
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 orang	130.216.129	Dinkes				

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	11.068.554	Dinkes
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	40.737.054	Dinkes
										Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	20.234.848	Dinkes
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	46.145.100	Dinkes
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	63.595.875	Dinkes
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	9.180.000	Dinkes
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	564.661.800	Dinkes
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	133.825.988	Dinkes
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	27.500.000	Dinkes
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	356.875.997	Dinkes
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	282.395.100	Dinkes

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	1.985.900.803	Dinkes
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	242.643.286	Dinkes
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	122 unit	73.759.769	Dinkes
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	411.992.000	Dinkes
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN</b>													<b>103.021.429.057</b>	

Blitar, 5 Februari 2024  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PEMERINTAH KOTA BLITAR**



**dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes**  
 NIP. 19680305 200112 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN  
KOTA BLITAR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**  
Jabatan : **Walikota Blitar**  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

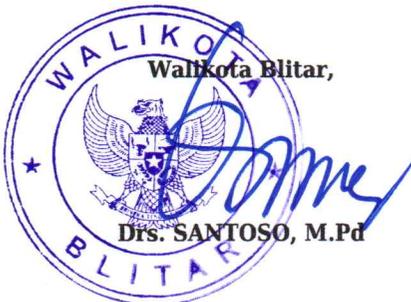
  
**Walikota Blitar,**  
**Drs. SANTOSO, M.Pd**

Blitar, 20 Oktober 2023  
**Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar**  
**Kota Blitar,**  
  
**dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196803052001121003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN  
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	500.00(per-100.00)
		Angka kematian Bayi (AKB)	9.93(per-1.000 )
		Prevalensi balita stunting	7.00(%)
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15.20(%)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	65.00(%)
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0.60(Skala)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	87.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3,949,060,260.00	DAU, DAK Non Fisik, BK Provinsi
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	408,532,303.00	DAK Non Fisik
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	881,094,486.00	DAU dan DAK Non Fisik
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69,713,866,705.00	DAU, DAK Non Fisik, DBHCHT, DAK Fisik, dan Kapitasi JKN pada FKTP
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,068,875,303.00	DAU
<b>Total:</b>		<b>103,021,429,057.00</b>	



**PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Blitar**  
**Tahun : 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	500 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	190,46		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	506.808.474,00	491.153.401,00	96,91	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	151,96		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.341.249,00	28.568.000,00	94,16	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	7%	7,64%	90,86		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.587.573.912,00	3.533.926.726,00	77,03	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	15,20%	30,9%	203,39		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.815.794.591,00	46.099.144.581,50	96,41	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	65%	77,27%	118,88		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	16.773.348.479,00	10.311.079.459,36	92,10	
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	881.094.486,00	878.463.254,00	99,70		
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	408.532.303,00	402.773.242,00	98,59		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.721.610.800,00	3.949.060.260,00	98,38	
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (85,08)	97,79		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	28.068.875.303,00	27.281.390.588,20	97,19	

Blitar, 5 Februari 2024  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA BLITAR  
  
Dr. PHARMA SUTIAWAN, M.MKes.  
 NIP. 19880305 200112 1 003